KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PUSAT PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Nomor SOP	PHN-OT.02.02-71
Tanggal Pembuatan	11 September 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Oktober 2019
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  H.R. Benny Riyanto NIP 19620410 198703 1 003
Nama SOP	Pengelolaan Website Penyuluhan Hukum

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S1
2. S2
3. Tenaga Ahli

Keterkaitan :

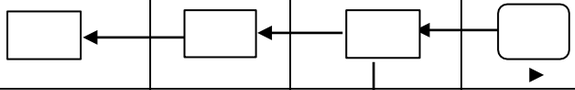
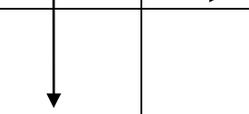
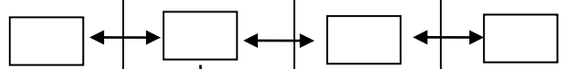
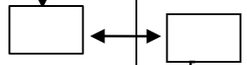
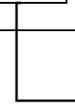
1. Bidang Penyuluhan Hukum
2. Bidang Bantuan Hukum
3. Bidang Pembudayaan Hukum
4. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
5. Bagian Program dan Pelaporan BPHN
6. Fungsional Penyuluh Hukum

Peralatan / perlengkapan :

Website lsc.bphn.go.id
Website luhkum.bphn.go.id

Peingatan :

Pencatatan dan pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KAPUS	KABID	KASUBID	JFU	Penyuluh Hukum	Tenaga Ahli	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan tema rubrik-rubrik								2 (dua) Minggu	Konsep dan draft rubrik	
2	Pengumpulan data-data entry dari para penyuluh maupun dari masyarakat berupa konsultasi melalui menu konsultasi hukum online yang ada di laman lsc.bphn.go.id								1 (tahun)	Data input	
3	Penyusunan Konten berdasarkan menu-menu yang tersedia di aplikasi oleh Bidang Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan JF Penyuluh Hukum								1 (satu) tahun	Draft konten	
4	Penginputan Konten								1 (satu) tahun	Konten	
											

5	Maintenance								1 (satu) bulan	Feedback, update peta penyuluhan hukum online, konsultasi hukum online	
6	Pengembangan website								1 (satu) tahun	Link ke jejaring sosial, marketing sosial	

